

# Peran kepemimpinan dalam pengembangan koleksi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rani Kurnia Vlora

Program Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
e-mail: ranikurniav@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam pengembangan koleksi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diketahui Peran pemimpin atau kepala perpustakaan memiliki pengaruh penting terhadap kebijakan pengelolaan perpustakaan. Praktek kepemimpinan tersebut dapat dilihat pada tataran praktis pengembangan koleksi di perpustakaan yang mencakup mekanisme lelang, promosi, kerjasama, dan eksistensi korner. Kesimpulannya bahwa peran kepemimpinan kepala perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengembangan koleksi di perpustakaan sangat penting, kepala perpustakaan berperan dalam kegiatan kerjasama, promosi dan pembentukan korner. Koleksi yang didapat melalui kerjasama dan promosi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemustaka. meskipun Kepala perpustakaan tidak memiliki kuasa penuh dalam kegiatan lelang karena penentuan peserta dan pemenang lelang perpustakaan tidak ikut andil. Namun dalam penandatanganan MOU untuk pembentukan korner-korner Kepala perpustakaan memiliki kebijakan penuh.

**Keyword:** kepemimpinan, pengembangan koleksi, perpustakaan perguruan tinggi

## Pendahuluan

Perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi harus terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakainya. Perpustakaan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai sebuah tempat atau ruang untuk menyimpan koleksi tercetak maupun non cetak yang dikelola secara sistematis dan dilayankan kepada pemustaka untuk pemenuhan kebutuhan informasi. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan koleksi sebagai sumber informasi menjadi salah satu fungsi perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga atau organisasi tentu tidak akan pernah lepas dari birokrasi kepemimpinan. Menurut House dalam Yukl, kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi (Yukl, 2009). Sistem kepemimpinan di sebuah organisasi memiliki kekuasaan dan pengaruh yang kuat, sedangkan kekuasaan dari seorang pemimpin akan

melahirkan sebuah kebijakan. Kebijakan pemimpin di perpustakaan akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi perpustakaan seperti dalam pengembangan koleksi.

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan suatu unit pelaksana teknis (UPT) yang bersama-sama dengan unit lain turut melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memilih, menghimpun, mengolah, merawat, dan melayani sumber informasi kepada lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya (Qalyubi, 2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada dasarnya semua perpustakaan apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, untuk dapat berjalan mengemban tugas dan fungsinya harus didukung dengan ketersediaan biaya yang memadai. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dalam hal ini Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapatkan anggaran sebesar 1 Milyar lebih dari dana APBN untuk pengembangan koleksi perpustakaan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Laugu menjelaskan bahwa “pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi islam di Yogyakarta sarat dengan permainan kepentingan dan ideologi dikalangan aktor yang kemudian terepresentasi dalam praktik manajerial dan pelayanan perpustakaan”. Aktor-aktor yang bermain tidak lain adalah mereka yang memiliki kuasa di perpustakaan, sedangkan dampak dari kepentingan mereka pada ranah praktik manajerial salah satunya adalah pengembangan koleksi di perpustakaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Laugu pada tahun 2012 dijadikan primari riset dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran kepemimpinan dalam pengembangan koleksi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016.

Pada dasarnya semua perpustakaan apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, untuk dapat berjalan mengemban tugas dan fungsinya harus didukung dengan ketersediaan biaya yang memadai (Sutarno, 2014). Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dalam hal ini Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapatkan anggaran sebesar 1 Milyar lebih dari dana APBN untuk pengembangan koleksi perpustakaan (Wawancara dengan wakil kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Laugu menjelaskan bahwa “pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi islam di Yogyakarta sarat dengan permainan kepentingan dan ideologi dikalangan aktor yang kemudian terepresentasi dalam praktik manajerial dan pelayanan perpustakaan” (Laugu, 2015).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (Qualitatif Descriptive). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan dan memahami fenomena tentang apa yang terjadi (Moleong, 2012). Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena ingin mengungkap fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada bulan desember 2016, sedangkan objek penelitian ini adalah semua orang yang terlibat dalam organisasi perpustakaan. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, mereduksi data dan membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan, menyusun dalam satuan-satuan kemudian dikategorikan sesuai jenis dan kebutuhan, memeriksa keabsahan data, menafsirkan data, menuliskan hasil analisis kedalam laporan (Moleong, 2012). Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi dan dokumen dan mengkroscek ulang data-data yang diperoleh.

## Kajian Teori

### Kepemimpinan

Menurut Moeljono, pemimpin adalah manusianya sementara kepemimpinan adalah sifat yang melekat kepadanya sebagai pemimpin (2003). Adapun dari segi bahasa kepemimpinan diartikan sebagai perihal pemimpin atau cara memimpin (KBBI). Sedangkan dari segi istilah Hempil dan Coons dalam Yukl mendefinisikan kepemimpinan sebagai perilaku individu yang mengarahkan aktivitas kelompok untuk mencapai sasaran bersama (2009). Yukl sendiri mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama (2003). Kepemimpinan juga didefinisikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok (Thoha, 2003).

- 1) Unsur pemimpin atau yang mempengaruhi.
- 2) Unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi.
- 3) Unsur interaksi atau kegiatan atau usaha dan proses mempengaruhi.
- 4) Unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi.
- 5) Unsur perilaku atau kegiatan sebagai hasil mempengaruhi

Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang melayani seluruh kebutuhan civitas akademika di perguruan tinggi tertentu (akademi, universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik) yang bertujuan untuk menunjang pencapaian tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Rahayuningsih, 2007). Keberadaan sebuah perpustakaan di perguruan tinggi sangat vital, oleh karena itu perpustakaan perpustakaan sering disbut dengan jantungnya perguruan tinggi. Pada hakikatnya perpustakaan perguruan tinggi juga dapat diartikan sebagai tempat penyedia

informasi bagi seluruh civitas akademika di perguruan tinggi sebagai penunjang proses pendidikan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### ***Pengembangan koleksi di Perpustakaan Perguruan Tinggi***

Perpustakaan terus berkembang seiring dengan pengembangan koleksinya. Keberadaan koleksi dapat menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah perpustakaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 tentang perpustakaan, “koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan” (Lasa, 2009). Pengembangan koleksi adalah semua kegiatan untuk memperluas koleksi yang ada di perpustakaan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan dan pengadaan bahan pustaka (Rahayuningsih, 2007). Pengembangan koleksi juga merupakan proses kegiatan yang mencakup antara lain menetapkan dan koordinasi terhadap kebijakan seleksi, penilaian terhadap kebutuhan pengguna dan pengguna potensial, kajian penggunaan koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi, seleksi bahan pustaka, perencanaan untuk kerja sama, pemeliharaan koleksi, dan penyiangan (Yuyu Yulia, 2003).

Pengembangan koleksi di perpustakaan dilakukan melalui dua tahap yaitu pemilihan dan pengadaan. Pemilihan koleksi harus disesuaikan dengan kebutuhan pustaka dengan tidak mengesampingkan jumlah anggaran dana, karena besaran anggaran akan sangat menentukan proses pengadaan. Pengadaan merupakan proses menghimpun koleksi yang akan dijadikan koleksi perpustakaan, sedangkan prosesnya dapat dilakukan dengan pembelian, penerimaan hadiah, tukar menukar koleksi dan keanggotaan organisasi (Rahayuningsih, 2007).

Menentukan kewenang, tugas dan tanggung jawab semua unsur yang terlibat dalam pengembangan koleksi yaitu bagian layanan teknis merupakan bagian yang mengurus masalah pengembangan koleksi perpustakaan. Meskipun bagian layanan teknis melakukan kegiatan pengembangan koleksi, tetapi perlu dilakukan penunjukan siapa yang berwenang melakukan kegiatan pemilihan bahan pustaka, pengadaan, dan kegiatan lainnya. Untuk perpustakaan perguruan tinggi, kewenangan untuk merumuskan kebijakan pengembangan koleksi dipercayakan kepada pustakawan senior, wakil dari fakultas atau jurusan, wakil dari lembaga seperti Lembaga Penelitian. Sedangkan untuk pemilihan bahan pustaka dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari pustakawan, tenaga pengajar dan peneliti, dan mahasiswa. Sedangkan yang berhak menetapkan pengadaan bahan pustaka yang telah diseleksi adalah pimpinan perpustakaan.

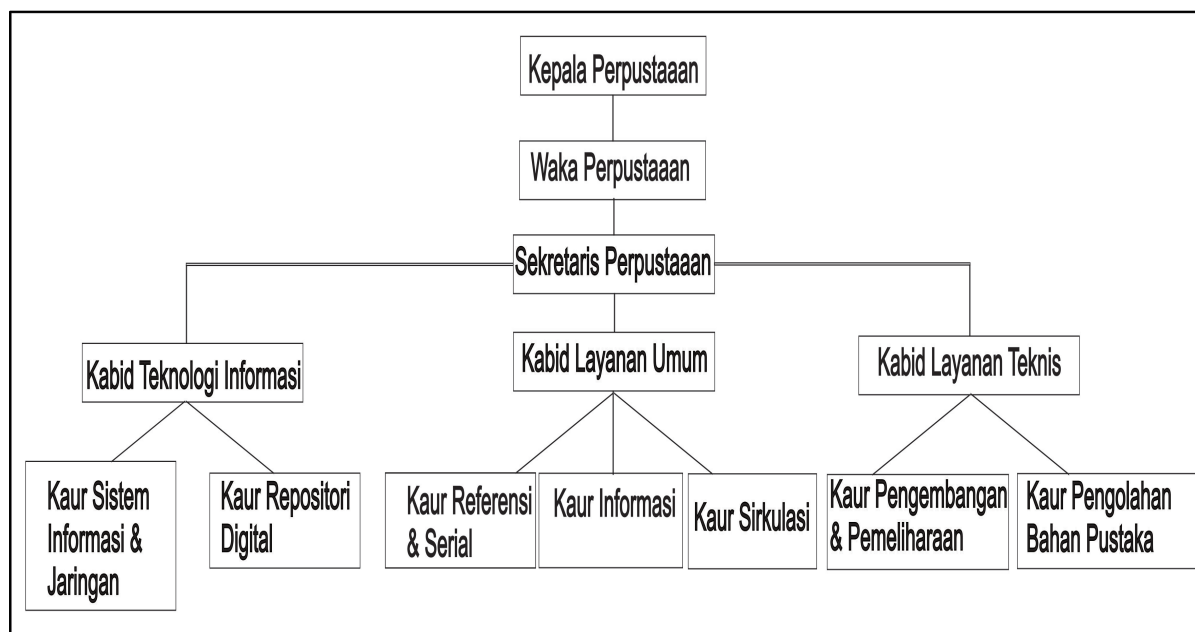
Sejarah terbentuknya Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tidak dapat dipisahkan dengan institusi induknya, yaitu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang didirikan pada tanggal 26 September 1951 berdasarkan PP No. 34 Tahun 1950. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 1960 berdasarkan PP No. 11 Tahun 1960 PTAIN Yogyakarta digabungkan dengan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah, di Yogyakarta. Kemudian IAIN Sunan Kalijaga berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada tanggal 14 Oktober 2004 berdasarkan Keputusan Presiden No.50 Tahun 2004.

Visi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah “Mengembangkan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sebagai perpustakaan penelitian berbasis keislaman dan keilmuan”. Untuk Misi Perpustakaan adalah:

- a. Mengembangkan sumber-sumber belajar yang unggul dalam bidang keislaman dan keilmuan.
- b. Meningkatkan akses ke sumber-sumber penelitian dalam bidang keislaman dan keilmuan berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan kualitas layanan prima yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- d. Memperkuat hubungan kerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan akses ke sumber-sumber yang relevan.

Struktur organisasi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut: Kepala Perpustakaan UIN dijabat oleh Dra. Labibah, MLIS, sedangkan wakilnya dijabat oleh Sri Astuti, SIP. MIP. Dibawah wakil ada tiga Kabid (Kepala bidang) yaitu Kabid Layanan Pemustaka, Kabid Layanan Teknis dan Kabid Layanan Teknologi Informasi. Dibawah kepala bidang tersebut, dibentuk tujuh kepala urusan (KAUR) yaitu Kaur Sistem Informasi dan Jaringan, Kaur Repositori Jaringan, Kaur Pengembangan dan Pemeliharaan Koleksi, Kaur Sistem Informasi dan Jaringan, Kaur Pengolahan Bahan Pustaka, Kaur Repository Digital, Kaur Referensi dan Serial, dan Kaur Sirkulasi. Kepala urusan tersebut dibentuk bertujuan untuk memebantu kepala perpustakaan dalam menangani urusan internal yang

bersifat teknis dalam aktivitas perpustakaan (Struktur Organisasi UIN SUKA). Bagan struktur organisasi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Bagan struktur organisasi Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang Sunan Kalijaga

## Pembahasan

### *Peran Kepemimpinan Kepala Perpustakaan dalam Pengembangan Koleksi*

Perpustakaan dalam kedudukannya sebagai lembaga atau organisasi dikelola oleh para praktisi-praktisi perpustakaan yang dipimpin oleh kepala perpustakaan. Peran pemimpin atau kepala perpustakaan memiliki pengaruh penting terhadap kebijakan pengelolaan perpustakaan. Praktek kepemimpinan tersebut dapat dilihat pada tataran praktis pengembangan koleksi di perpustakaan yang mencakup mekanisme lelang, promosi, kerjasama, dan eksistensi korner. Adapun peran kepala perpustakaan dalam pengembangan koleksi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### *Mekanisme Lelang*

Penelitian yang telah dilakukan oleh Laugu pada tahun 2012 menjelaskan bahwa perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang notabennya berada dibawah Perguruan Tinggi Negeri dan sebagian besar anggaran dananya diperoleh dari pemerintah pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan koleksi, maka mekanisme lelang terbuka harus dilakukan untuk menghindari kolusi dan nepotisme. Namun penyimpangan masih saja terjadi misalnya pemenang lelang bukan penawar terendah dengan alasan kekurangan persyaratan dokumen. Peristiwa tersebut memberikan indikasi dan berpotensi memunculkan kolusi dan korupsi berjamaah (Laugu, 2015).

Pada tahun 2016, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga mendapat anggaran sebesar 1,8 Milyar untuk pengadaan koleksi di perpustakaan:

*“Anggaran pengembangan koleksi di perpustakaan pertahunnya untuk tahun 2016 itu turun drastis terjadi pemotongan untuk ebook dan e-jurnal itu sekitar 1 Milyar, untuk buku sekitar 800 juta itu termasuk kecil sebelumnya kita sempat sampai 1 Milyar untuk koleksi elektronik, untuk buku kita sempat 1 Milyar sampai 1,5 Milyar jadi 800 juta untuk buku itu termasuk sedikit” (Wawancara, 2016).*

Berdasarkan besar anggaran tersebut maka mekanisme pengadaan koleksi harus melalui lelang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat (PP No. 4 Th. 2010 tentang Perpustakaan).

Kepala perpustakaan tidak memiliki kekuasaan penuh dalam menetapkan panitia lelang, karena mekanisme lelang koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan oleh panitia lelang dan pihak perpustakaan hanya bertugas menyeleksi koleksi mana yang akan dibeli. Hanya kepala perpustakaan dan beberapa pustakawan yang dilibatkan dalam proses lelang.

*“Pihak perpustakaan sendiri tidak melakukan lelang, tetapi kalau pengembangan koleksi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga melakukannya dengan cara mencari katalog lalu menyebarkan ke pemustaka serta civitas akademika dan dosen-dosen untuk mendapatkan informasi apa yang dibutuhkan oleh mereka, kemudian mengevaluasi, memverifikasi, lalu dipilih disesuaikan dengan dana yang disediakan dan daftar koleksi tersebut diserahkan ke bagian rumah tangga” (Wawancara, 2016).*

Berdasarkan penuturan diatas, dapat diketahui bahwa perpustakaan tidak memiliki kuasa penuh dalam pelelangan pengadaan bahan pustaka. Tanggung jawab kepala perpustakaan adalah mengutus kepada bagian pengembangan koleksi untuk menyeleksi dan mendaftar koleksi apa saja yang akan dibeli. Daftar koleksi tersebut dibuat melalui kegiatan evaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka, sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan sepenuhnya di kendalikan pihak panitia lelang. Penentuan pemenang lelang juga bukan menjadi tanggung jawab kepala perpustakaan. Banyaknya peserta lelang yang tidak lolos seleksi karena sistem administrasi yang kurang memenuhi syarat.

*“Emang aturannya banyak banget, jadi sistem yang menentukan siapa yang menang lelang. Pemenang lelang ditentukan dengan syarat yang banyak dan berdasarkan aturan serta anggaran yang ditawarkan” (Wawancara, 2016).*



Melihat fenomena diatas dapat diketahui bahwa mekanisme lelang koleksi bahan pustaka yang di lakukan perpustakaan di tahun 2016 ini sama dengan tahun 2012, yaitu kegiatan lelang seperti telah di seting dalam sistem dan disitulah representasi kuasa terlihat jelas. Peran kepemimpinan kepala perpustakaan tidak terlalu terlihat, karena pemenang lelang perpustakaan tidak ditentukan oleh kebijakan kepala perpustakaan. Namun kepala perpustakaan memiliki kebijakan penuh dalam menentukan koleksi apa yang akan dibeli yang kemudian menjadi koleksi perpustakaan.

### **Promosi**

Promosi dalam ranah ini dapat dilihat dalam dua sisi, pertama promosi yang dilakukan oleh penerbit, dan promosi yang dilakukan oleh perpustakaan. Kepala perpustakaan memiliki peran penting dalam hal menentukan kebijakan promosi di perpustakaan, namun promosi dari pihak penerbit berdampak besar pada kemungkinan keputusan dalam pengadaan koleksi di perpustakaan. Banyaknya tawaran-tawaran dari penerbit melalui katalog dan kerjasama tidak menutup kemungkinan memberikan stimulus bagi perpustakaan untuk menganggarkan pembelian buku ketika kondisi keuangan perpustakaan memungkinkan (Laugu, 2015).

Laugu mengungkapkan bahwa Pada era digital seperti saat ini banyak bermunculan penyedia atau provider jurnal elektronik. Dari masing-masing provider jurnal menawarkan keunggulan informasi yang terkandung dalam konten databasenya, tentunya hal ini tidak lepas dari permainan penguasaan pasar jurnal elektronik yang ada. Jenis koleksi dalam bentuk jurnal elektronik saat ini menjadi tren akses pengetahuan yang merupakan produksi kapitalis melalui dukungan teknologi komunikasi (2015). Banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak provider untuk memenangkan produknya agar produknya dapat dibeli atau dilanggan oleh perpustakaan. Dampak yang di alami perpustakaan dari fenomena ini adalah adanya tuntutan untuk melanggan jurnal elektronik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan informasi pustaka.

Banyak penerbit maupun provider jurnal elektronik yang menawarkan produk mereka untuk dijadikan koleksi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Namun perpustakaan tidak serta-merta melakukan keputusan secara sepihak dalam pembelian atau melanggan produk tersebut.

*“pihak vendor atau provider jurnal elektronik biasanya memberikan free trial selama satu bulan untuk melihat konten jurnal produknya, dan itu kita bebas mendownload. Kesempatan ini kita manfaatkan untuk membagikan akses kepada dosen-dosen guna mengecek isi jurnal sudah sesuai dengan kebutuhan apa belum. Jika belum sesuai kebutuhan, ya tidak jadi kita langgan”* (Wawancara, 2016).

Berdasarkan penuturan diatas dapat diketahui bahwa peran kepala perpustakaan dalam kebijakan promosi terlaksana, karena tidak semua koleksi yang ditawarkan penerbit tidak langsung dilanggan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dan dipertimbangkan dengan kebutuhan pemustaka. Selain promosi yang dilakukan oleh pihak penerbit atau provider, perpustakaan juga melakukan kegiatan promosi dengan cara meminta masukan dari beberapa pihak terkait pengembangan koleksi di perpustakaan.

*“Perpustakaan dalam melakukan promosi pengembangan koleksi melibatkan Dosen, Civitas Akademik dan mahasiswa. Mereka diberikan hak untuk mengusulkan koleksi-koleksi yang dibutuhkan sehingga dari usulan-usulan yang diajukan dapat meningkatkan minat berkunjung ke perpustakaan ini didasari oleh keikutsertaan mereka dalam pemenuhan kebutuhan informasi”.*

Promosi ini berujung pada penentuan kebijakan dalam pembagian persentase koleksi cetak dan non cetak dari jumlah anggaran yang ada. Peran kepemimpinan kepala perpustakaan dalam hal ini juga sangat diperhitungkan. Kepala perpustakaan harus dapat menentukan prioritas koleksi apa yang akan dilanggan perpustakaan. Untuk dapat menentukan koleksi yang akan dilanggan kepala perpustakaan tidak dapat bekerja sendiri. Kepala perpustakaan harus bisa menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis dan didiskusikan bersama-sama dengan berbagai pihak dalam rapat. Meskipun ada beberapa aktor yang merekomendasikan produk tertentu untuk dibeli atau dilanggan pihak perpustakaan, penentuan pembelian atau melanggan koleksi tersebut menjadi kebijakan pimpinan perpustakaan.

### **Kerjasama**

Kerjasama yang dijalankan oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dalam hal ini yaitu menjalin kerjasama dengan pihak penerbit. Kerjasama ini bertujuan untuk memperoleh informasi judul-judul buku dan jurnal cetak maupun non cetak yang diterbitkan di seluruh dunia. Perpustakaan berharap, dengan adanya kerjasama ini akan memberi perubahan dalam pengembangan koleksi di perpustakaan yang berujung pada keberagaman koleksi dan kebutuhan informasi pemustaka akan terpenuhi. Hal tersebut dapat terwujud karena pihak perpustakaan dalam mengadakan koleksi tidak serta merta menentukan secara sepihak tentang koleksi apa yang akan diadakan. Peran kepala perpustakaan dalam kerjasama dengan beberapa penerbit sangat penting. Kepala perpustakaan dapat melakukan kerjasama langsung dengan penerbit atau memberikan kewenangan kepada bagian kerjasama.

Kepala perpustakaan harus membuat kebijakan kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang diterima perpustakaan tidak lain adalah didatarkannya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laugu mengungkapkan bahwa adanya hubungan antara agen atau penerbit dan oknum di dalam yang bermain dengan perjanjian tertentu yang nantinya berujung adanya sifat dominan untuk menentukan penerbit mana yang akan diajak kerjasama. Hal ini berpengaruh dalam menentukan kebijakan pengembangan koleksi yang berdampak pada ekonomi perpustakaan (Laugu, 2015). Namun, ini berbeda dengan ungkapan wakil kepala perpustakaan, yang menuturkan bahwa:

Berdasarkan ungkapan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kebijakan kerjasama di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak bersifat subjektif. Perpustakaan benar-benar menyeleksi koleksi yang akan di adakan atau dibeli, selain itu juga karena sudah adanya ketentuan kebijakan yang berlaku di perpustakaan. Pengembangan koleksi di perpustakaan harus dilakukan dengan transparan, sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan tidak boleh ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan sendiri. Oleh sebab itu kebijakan kepala perpustakaan dalam kerjasama sangat penting.

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga memiliki beberapa korner, yaitu korner Kanada, Iran, Saudi Arabia dan Difabel. Adanya layanan korner tersebut merupakan upaya kerjasama untuk membangun hubungan budaya, sosial, dan akademik antara kedua pihak. Seperti contoh pihak Kanada melalui Universitas McGill menjalin kerjasama dengan pihak Kementerian Agama pelaksanaanya salah satunya adalah UIN Sunan Kalijaga dimana banyak menghasilkan alumni yang memiliki posisi penting di UIN Sunan Kalijaga. Korner Iran memberikan tanggung jawab untuk melayani koleksi-koleksinya kepada pemustaka.

Kerjasama pembentukan korner Arab Saudi menemukan ketidaksepahaman dengan pihak Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi tidak mementingkan adanya bentuk korner, yang penting bagi mereka adalah koleksi yang disumbangkan segera dimanfaatkan oleh pemustaka. Sedangkan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga justru memiliki paham bahwa dalam kerjasama tersebut merupakan kerjasama berupa korner. Sehingga ketidakpahaman ini berdampak pada pengelolaan korner Arab Saudi vakum (Laugu, 2015).

Apabila ditinjau lagi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Laugu mengenai eksistensi korner Arab Saudi, yakni tidak menjalin kerjasama secara tertulis melainkan pemerintah Arab Saudi hanya menyerahkan (menghibah) koleksinya agar bisa dimanfaatkan oleh pemustaka (Laugu, 2015)). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari wakil kepala perpustakaan, yaitu:

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dapat diketahui perbedaan dengan korner lainnya yang secara langsung menjalin kerjasama sehingga fungsi korner lebih berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan bisa menjadi salah satu daya tarik pemustaka dalam menambah referensi. Bahkan saat ini korner di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tidak hanya Arabian Corner, Canadian corner, dan Difabel corner melainkan terdapat Bank Indonesia Corner yaitu hasil dari kerjasama pihak Perpustakaan dengan Bank Indonesia. Sehingga saat ini Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga mengalami perubahan jumlah korner yang dapat dilayankan. Peran kepala perpustakaan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan korner dengan membentuk kerjasama yang lebih baik dan menentukan MOU yang jelas dengan korner-korner tersebut.

## Simpulan

Simpulan dari pembahasan makalah ini adalah bahwa peran kepemimpinan kepala perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengembangan koleksi di perpustakaan sangat penting, meskipun dalam pengembangan koleksi tersebut serat akan kepentingan-kepentingan para penguasa. Kepala perpustakaan tidak memiliki kuasa penuh dalam kegiatan lelang karena penentuan peserta dan pemenang lelang perpustakaan tidak ikut andil, namun kepala perpustakaan sebagai pemimpin memiliki kebijakan dan tanggung jawab penuh dalam penentuan koleksi yang akan diusulkan dalam lelang. Peran kepala perpustakaan juga sangat penting dalam kegiatan kerjasama, promosi dan pembentukan korner. Kebijakan yang dibuat kepala perpustakaan dalam promosi dan kerjasama dengan penerbit harus tepat. Koleksi yang didapat melalui kerjasama dan promosi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Kepala perpustakaan juga memiliki kebijakan penuh dalam penandatanganan MOU dalam pembentukan korner-korner di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## Daftar Pustaka

- Djokosantoso, M. (2003). *Beyond leadership*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Dubrin, A. J. (2009). *Leadership*. Jakarta: Prenada.
- F, Rahayuningsih. (2007). *Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- <http://lib.uin-suka.ac.id/profil/struktur-organisasi.html> diakses 12 Desember 2016
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online, <http://kbbi.web.id/pustaka> (diakses 21 November, 2016).
- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/pimpin>. (diakses 7 November, 2016).
- Kouzes, J. A., & Posner, B. Z. (1997). *Kredibilitas*, alih bahasa: Anton Adiwiyoto. Jakarta: Profesional Book.
- Lasa Hs. (2009). *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publiser.
- Laugu, N. (2015). *Representasi Kuasa Dalam Pengelolaan Perpustakaan - studi kasus pada perpustakaan perguruan tinggi islam di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gapernus Press.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosyada karya.
- Pasolong, H. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1.
- Qalyubi, S. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.

- Sudaryono. (2012). *Leadership: Teori dan Praktek kepemimpinan*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia.
- Sulistyo-Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Universitas Terbuka, 2003.
- Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan. Jakarta: Samitra Media Utama, 2004.
- Thoha. (2003). *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Cet. 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 24 Ayat 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 39 Ayat 2.
- Wawancara dengan Kaur Informasi, 9 Desember 2016, pukul 11.00.
- Wawancara dengan wakil kepala perpustakaan. 9 Desember 2016, pukul 09.00.
- Yukl, G. (2009). *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta : Indeks.
- Yulia, Y. (2009). *Pengembangan Koleksi*. Jakarta: Univerisitas Terbuka.